

BIBLIOGRAPHY

BOOKS

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- ADB. 2010. *Anti Korupsi dan Integritas*. Asian Development Bank: Filipina
- AICPA. *Statement on Auditing Standards (SAS) No. 82*
- AICPA. *Statement on Auditing Standards (SAS) No. 99*
- Alkostar, A. (2008, Oktober). *Kerugian keuangan negara dalam perspektif tindak pidana korupsi*. *Majalah Hukum Varia Peradilan*, XXIII(275), page. 33-41
- Ali, Muhammad. 1998. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Angkasa
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). 2014. *Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia*.
- Agoes, Sukrisno., & Jan Hoesada. 2009. *Bunga Rampai Auditing. Edisi pertama*. Jakarta: Salemba Empat.
- APEC Anticorruption and Transparency Working Group (ACTWG). 2015. *Using Financial Flow Tracking Techniques and Financial Intelligence*. Singapore: APEC.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Investigasi. 2001. *Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Kasus Penyimpangan Yang Berindikasi Merugikan Keuangan/Kekayaan Negara dan/Atau Perekonomian Negara*. Jakarta: BPKP
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen dan Hak Asasi Manusia, 2009. *“Laporan Lokakarya tentang Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi”*. Republik Indonesia
- Bahder Johan, 2004. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Semarang: Mandar Maju
- BPKP, 2008. *Fraud Auditing*. Pusdiklatwas BPKP, Edisi ke-Lima
- BPKP. 2015. *“Pedoman Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP”*. Jakarta: BPKP
- BPKP. 2016. *“Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Tahun 2015-2019”*. BPKP Provinsi Jambi
- BPKP. 2018. *Majalah Paraiatte : Progressive and innovative* Vol. 29, ISSN: 2086-4426. Makassar: Perwakilan BPKP SULSEL
- Boynton, William C. Johnson., Raymond N. and Kell, Walter G. 2001. *“Modern Auditing”*, Edisi Ketujuh, Jilid 2, Jakarta: Erlangga
- Campos, Edgardo and Pradhan, Sanjay. 1999. *The impact of corruption on investment: predictability matters*.
- Danil, H. Elwi, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya (Corruption: Concept, Criminal Violations, and Its Eradication)*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011)
- Deputi Bidang Investigasi, BPKP. 2019. *“Proactive Auditing: Instrumen Pencegahan Fraud”*. Jakarta: BPKP.
- Elmi, Iswan. 2019. *Kebijakan Teknis Pengawasan Deputi Bidang Investigasi*. Jakarta: BPKP RI.
- European Council. (2004). *G8 Best Practic Principles on Tracing, Freezing and Confiscatin of Assets*. Strasbourg: Council of Europe.

- Haryono Umar. 2011. *“Peran Akuntan dalam Pemberantasan Korupsi”*. Jakarta: KPK RI.
- IFAC. 2014. *Handbook Of International Auditing, Assurance, and Ethics Pronouncements*. New York: International Federation of Accountants (IFAC)
- International Centre for Asset Recovery. 2009. *Tracing Stolen Assets A Practitioner’s Handbook*. Basel: Basel Institute on Governance. Page. 21
- Justisia, 2011. *“Akulah Negara Paling Korup”*, Edisi 37
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2015). *Laporan Tahunan KPK 2014*. Jakarta: KPK RI.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2016). *Laporan Tahunan KPK 2015*. Jakarta: KPK RI.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2017). *Laporan Tahunan KPK 2016*. Jakarta: KPK RI.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). *Laporan Tahunan KPK 2017*. Jakarta: KPK RI.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Laporan Tahunan KPK 2018*. Jakarta: KPK RI.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2017). *Laporan Tahunan KPK 2016*. Jakarta: KPK RI
- KPK. 2016. *“Modul Tindak Pidana Korupsi”*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat
- Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Langseth, Petter, Stapenhurst, R., Pope, J. 1997. *The Role of National Integrity System in Fighting Corruption*, EDI Working Paper, The Economic Development Institute of the World Bank
- Marwan,Mas., 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Matthew H. Fleming. 2005. *“Asset Recovery and its Impact on Criminal Behavior, An Economic, Taxonomy, Draft for Comments”*,. University College London
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2000, *“Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia”* Semarang : Badan Penerbit UNDIP
- O.C Kaligis, 2011. *Pendapat Ahli dalam Perkara Pidana*, Bandung : Alumni, Cetakan kedua
- Puspito, Nanang T, dkk. 2011, *“Pendidikan Anti Korupsi”*, Jakarta: Kemendikbud
- Sawyer, Dittenhofer, S. Cheiner, 2005. *Internal Auditing, Buku Satu*, Edisi Kelima, Jakarta : Salemba Empat
- Singleton & Singleton. 2010. *“Fraud Auditing and Forensic Accounting Fourth Edition”*. Wiley Corporate F&A
- Soejatna Soenoesoebata, 2005. *Apa Peranan Akuntan di Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi ?*, Varia Peradilan, Tahun XX No.241
- Soerjono Soekanto, 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada

- Soejono Soekantor dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pershall
- Tim SPORA 2015. “*Pengantar Kelembagaan Antikorupsi*”, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi
- Transparency International. 2008. *Transparency International 2008 Corruption Perceptions Index – Immediate Release*.
- Tuanakotta, Theodorus. M. 2010. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

JOURNALS

- Ahmar, Nurmal. 2017. “*Investigasi atas revaluasi aset, penyajian laporan keuangan, dan kualitas auditor berbasis mandatory IFRS*”. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya
- Atmasasmita, Romli. 2014, “*Asset Recovery dan Mutual Assistance In Criminal Matters, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta perkembangannya Dewasa Ini*”, Mahupiki dan FH Universitas Gadjah Mada
- Chalid, Hamid ; Johan, Abdi Kurnia. 2010. *Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Tiga Zaman : Orde Lama, Orde Baru dan Era Reformasi*. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia
- Fajar, Arif., W. 2017, “*Efektifitas Peran BPKP dalam Pembinaan dan Pengawasan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)*”. Yogyakarta: UII
- Firdaus, Muhammad. 2018. “*Peran Otorisasi Jasa Keuangan dalam Pengawasan Perbankan untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi di PT. Bank SUMUT*”. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara
- Gede Wayan S, I. 2008. “*Transformasi Demokrasi dan Otonomi Dalam Tata Pemerintahan Desa Mengwi Era Transisi: Perspektif Kajian Budaya*”. Ringkasan Disertasi Program Doktor Kajian Budaya Universitas Udayana
- Indah, Anggun., dkk. 2016. “*Peran BPKP dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Jawa Tengah*”. Semarang: UNDIP
- Indonesia Corruption Wacth, *Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Usul Inisiatif Masyarakat* (edisi Revisi 2015)
- Lidyah, Rika. “*Korupsi dan Akuntansi Forensik*”. 2016. UIN Raden Fatah
- Maksum R, Irfan, 2006. “*Pengawasan Intern Daerah Otonom*”, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Bisnis & Birokrasi, Vol 14 No.4
- Nurmawan, Dedy S.,2017. “*Prosedur Audit Investigatif Untuk Tujuan Pelacakan Aset hasil Tindak Pidana Korupsi*”. Politeknik Keuangan Negara STAN Tangerang Selatan
- Purwaning M. Yanuar, 2007. “*Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*”, Bandung: PT Alumnus

- Rahmy Putri Yulia, “*Peranan BPK dan BPKP menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Rangka Penanganan Perkara Korupsi*”, Jurnal Bina Adhyaksa, 2016
- Rahmi., dkk. 2016. *Mengungkap Korupsi Melalui Bukti Audit Menjadi Bukti Menurut Hukum*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung
- Rosyadi Imron, Muhamad, 2016, *Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Menilai Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Mimbar Keadilan.
- Septiani, Andi.,EH. 2019. “*Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigatif, dan Professional Judgment Terhadap Pengungkapan Fraud dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderating (Studi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan)*”. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin
- Setyawan, Dudi dan Khusna. 2018. “*Mengungkap Korupsi Melalui Bukti Audit Menjadi Bukti Menurut Hukum*”. Universitas Surabaya
- Suseno, Agung. 2010. “*Eksistensi Bpkp Dalam Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan*”. Jakarta: Fisip UI
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*. Jakarta: ElsamHuma
- Yasir, R. Et,All., 2019. “*Kewenangan Menetapkan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk /2015/Pn.Bna Dan Putusan Nomor : 23/Pid.Sus/Tpk/2017/Pn.Bna)*”. Law Journal: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Yutho,Emerson., dkk. 2014, “*Hasil Penelitian: Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*”. Jakarta: Indonesia Corruption Watch
- Zuarna, Rustam. 2013. “*Kekuatan Alat Bukti Bpkp (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar*”. Makassar: UIN ALAUDDIN

INTERNET

- Australian Taxation Office (ATO). (accessed at <https://www.ato.gov.au/About-ATO/>) dalam InsideTax. 2013. “*Persoalan Konsultan Pajak*”. Edisi 17. Jakarta: Danny Darussalam. page. 37
- Australian Taxation Office (ATO). “*Project Wickenby Result*”. (accessed at <https://www.ato.gov.au/General/The-fight-against-tax-crime/News-and-results/Project-Wickenby-results/> on 27 March 2020)
- BPKP. 2012, “*MK Akui Kewenangan BPKP Lakukan Audit Investigasi*”. at: <http://www.bpkp.go.id/berita/read/9322/15/MK-Akui-Kewenangan-BPKP> (On 20 July 2020)
- BPKP. 2020. *Tentang Kami: Sejarah BPKP*. accessed at: <http://www.bpkp.go.id/konten/4/Sejarah-Singkat-BPKP.bpkp> (on 6 May 2020)
- BPKP. 2020. *Tugas dan Fungsi BPKP dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia. No 192 tahun 2014, pasal 2 dan 3* pdf. Accessed on: (<http://www.bpkp.go.id/konten/1/Tugas-dan-Fungsi.bpkp>) on 6 May 2020)

- Detikcom. 2017. “*Kasus Korupsi E-KTP*”. (<https://www.detik.com/search/searchall?query=kasus%20ektp&siteid=2&sortby=time&page=3> accessed on 17 Maret 2020)
- “*FAQ*”, Transparency International, dalam <https://www.transparency.org/research/cpi> (accessed on 7 March 2020)
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/11/sepanjang-2018-terdapat-454-kasus-penindakan-dugaan-korupsi> (accessed on 7 March 2020)
- Situs Resmi bpkp.go.id
- Otoritas Jasa Keuangan. “*Tentang OJK: Tugas dan Fungsi*” (<https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>, accessed on 17 March 2020)
- Otorisasi Jasa Keuangan, 2017, “*Laporan Triwulan-IV*”, page. 139, accessed on: (<https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-triwulanan/Documents/Laporan%20Triwulan%20OJK%20IV-2017.pdf>) (on 17 March 2020)
- Wikipedia. *Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan*. accessed dari: https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawasan_Keuangan_dan_Pembangunan (on 6 May 2020)
- Detikcom. 2019. “*5 Tahun Terakhir, Total Rp.1,6 T Aset Diselamatkan KPK Dari Korupsi*”. (<https://news.detik.com/berita/d-4454657/5-tahun-terakhir-total-rp-16-t-aset-diselamatkan-kpk-dari-korupsi> (accessed on 17 March 2020)
- Tribunnewscom. 2019. “*Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp 9,29 Triliun, ICW Sebut Asset Recovery Belum Maksimal*” (<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/28/kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-929-triliun-icw-sebut-asset-recovery-belum-maksimal> (accessed on 17 March 2020)

UNDANG-UNDANG

- Nota Kesepahaman Antara Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : Mou-418/K/D6/2007 - Nomor : Nk-06/1.02/Ppatk/04/07*
- UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bagian Penjelasan angka I. Umum*
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 2 ayat (1), *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 32 *Tentang Pemberantasan Korupsi*
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 18 Ayat (1) *Tentang Pemberantasan Korupsi*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana (KUHP)* Pasal 184 KUHP



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

The Possibility for Expanding the Investigative Audit Authority by Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) for the Purpose of Tracking Assets as the Results of Corruption
ZULFIKAR SATRIATAMA, Sri Wiyanti Eddyono, SH, LLM (HR), PhD

Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>